

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan sistim perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸
5. Standar prasarana dan sarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.⁶⁹
6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.⁷⁰
7. Standar pembiayaan (biaya operasi satuan pendidikan) adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

⁶⁸ Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*. (Bandung: PT Bumi aksara, 2006) 17.

⁶⁹ Hedwig, Rinda. *Sistem Penjaminan Mutu Di Perguruan Tinggi Monitoring Dan Evaluasi Internal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) 42.

⁷⁰ Sagala, Widya Study. 2011. *Manajemen Penjaminan Mutu Guru (Studi Kasus di SMA Negeri 4 Malang)*. Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd (II) Dra. Mustiningsih, M.Pd.

7. Jumlah siswa per rombel maksimal 40 untuk semua kelas (kelas VII, VIII, dan IX)
 8. Rata-rata jam mengajar guru berkisar antara 26-38
 9. Jumlah laboratorium minimal 1 lab IPA, dan Laboratorium Multimedia (minimal sesuai dengan standar Sarana)
 10. Memiliki akses telpon pada lab multimedia, guru, dan kepala sekolah
 11. Memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BP, ruang Tata Usaha, kamar kecil yang cukup dan memadai (sesuai dengan Standar Sarana)
 12. Memiliki ruang perpustakaan (termasuk ruang baca) sesuai Standar Sarana/prasaran
 13. Sudah melaksanakan secara konsisten aspek-aspek dalam manajemen berbasis sekolah (otonomi/kemandirian, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas dan sustainabilitas)
 14. Memiliki perangkat media pembelajaran untuk semua mata pelajaran sesuai dengan SPM.
 15. Sudah melaksanakan sistim penilaian yang komprehensif (ulangan harian, UTS, UAS, ulangan kenaikan kelas) dengan teknik penilaian yang variasi (sesuai Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian)
4. **Implementasi Mutu Pendidikan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMP Avisena Jabon**

- 2) Pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara membuat dan pembagian tugas-tugas secara jelas • Pengembangan struktur dan keorganisasian sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah
- 3) Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien
- 4) Mendukung pengembangan perangkat penilaian
- 5) Pengembangan dan melengkapi administrasi sekolah
- 6) Implementasi MBS mengenai kemandirian/otonomi sekolah, transparansi, akuntabilitas, partisipasi/kerjasama, fleksibilitas, dan kontinuitas baik mengenai program, keuangan, hasil-hasil program serta lainnya oleh pihak manajemen sekolah
- 7) Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi oleh sekolah tentang kinerja sekolah
- 8) Pelaksanaan supervisi klinis oleh kepala sekolah atau tim yang dibentuk oleh sekolah
- 9) Penggalangan partisipasi masyarakat (pemberdayaan komite sekolah)
- 10) Membuat jaringan informasi akademik di internal maupun eksternal sekolah (SIM)

g. Pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan

Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP bahwa standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat

